



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012;
27. Peraturan mneteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E.5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.549.715.674.713,11 bertambah sejumlah Rp. 355.261.768.991,27 sehingga menjadi Rp. 1.904.977.443.704,38 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :
 - a. Semula Rp. 1.458.109.164.880,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 277.051.800.205,38 (+)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.735.160.965.085,38

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.549.715.674.713,11	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 355.261.768.991,27</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 1.904.977.443.704,38
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (169.816.478.619,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 91.606.509.833,11	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 78.209.968.785,89</u>	(+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp. 169.816.478.619,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00 (+)
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		<u>Rp. 169.816.478.619,00</u> (+)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 110.952.023.547,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.311.578.849,38</u>	(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 128.263.602.396,38
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.266.870.629.473,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.203.758.626,00)</u>	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 1.265.666.870.847,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	80.286.511.860,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>260.943.979.982,00 (+)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 341.230.491.842,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	17.269.037.674,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.133.647.607,00 (+)</u>

Jumlah hasil Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 21.402.685.281,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	48.780.475.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.498.901.706,00) (+)</u>

Jumlah hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 42.281.573.294,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	7.563.946.873,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.164.709.893,00 (+)</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.728.656.766,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	37.338.564.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.512.123.055,38 (+)</u>

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 55.850.687.055,38

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	61.766.551.473,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.203.758.626,00) (+)</u>

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 60.562.792.847,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.077.077.628.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.077.077.628.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 128.026.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 (+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 128.026.450.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 62.828.991.860,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.904.925.982,00 (+)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 77.733.917.842,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 237.091.054.000,00 (+)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan Rp. 237.091.054.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 17.457.520.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.050.000.000,00 (+)

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 25.507.520.000,00

d. Dana Bantuan Presiden

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 898.000.000,00 (+)

Jumlah Dana Bantuan Presiden setelah perubahan Rp. 898.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 901.020.771.904,11
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 289.481.899.099,28 (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.190.502.671.003,38

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 648.694.902.809,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 65.779.869.892,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 714.474.772.701,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	833.437.820.404,11
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>285.393.930.315,28 (+)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.118.831.750.719,38

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	13.985.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.000.000,00 (+)</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 14.085.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	14.891.201.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.919.284.000,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 19.810.485.500,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	7.021.327.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 7.021.327.500,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	26.685.422.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 26.685.422.500,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	59.909.075.109,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>511.349.355,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 60.420.424.464,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	229.902.245.955,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>19.013.736.822,00 (+)</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 258.299.151.390,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	358.883.581.745,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.088.148.423,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	395.755.196.847,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	91.606.509.833,11
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>78.209.968.785,89 (+)</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 169.816.478.619,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	91.606.509.833,11
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>72.878.722.768,89</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp. 164.485.232.602,00

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.319.246.017,00 (+)</u>

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 5.319.246.017,00

c. Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.000.000,00 (+)</u>

Jumlah Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir setelah perubahan Rp. 12.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal

BUPATI PANDEGLANG,

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

AAH WAHID MAULANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR

LapTop-Perda-Rubah-APBD-14

©Pemerintah Kabupaten Pandeglang: <http://pandeglangkab.go.id/>